



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

PENGUMUMAN

Nomor: 88/DJMT/PENG.KP.1.1/III/2026

TENTANG
EKSAMINASI PEJABAT KEPANITERAAN
PADA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

Sehubungan dengan Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1/DJMT/KP.1.1/II/2026 tentang Uji Kepatutan dan Kelayakan Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026, Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 33/DJMT/PENG.KP.1.1/II/2026 tentang Penundaan Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026, dalam rangka kebutuhan organisasi dan pengimplementasian sistem merit dalam manajemen aparatur Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan hal tersebut, diberitahukan kepada Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon Peserta, meliputi:
 - Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berijazah minimal Sarjana Hukum;
 - e. Sehat secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban jabatan;
 - f. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
 - g. Memahami dan mampu mengoperasikan Sistem Informasi Pengadilan; dan
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Persyaratan Khusus
Formasi Jabatan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama
 - Berpengalaman sebagai Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - Sekurang-kurangnya berpangkat Penata Tingkat I (III/d).
2. Materi yang diujikan, meliputi:
 - a. Manajemen (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan;
 - b. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c. Integritas dan Kode Etik Panitera dan Juru Sita;
 - d. Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan secara elektronik (*e-Court*);
 - e. Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek mengoperasikan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)).



3. Kegiatan Eksaminasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengumuman Pelaksanaan Eksaminasi	4 Maret 2026	Diumumkan melalui <i>website</i> Ditjen Badilmiltun
2	Pendaftaran dan pengiriman berkas persyaratan Calon Peserta Eksaminasi	4 s.d. 11 Maret 2026	Persyaratan dikirimkan ke alamat surat elektronik: mutasipaniteratun@gmail.com
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 Maret 2026	Diumumkan melalui <i>website</i> Ditjen Badilmiltun
4	Pelaksanaan Eksaminasi	8 s.d. 10 April 2026	
5	Pengumuman Hasil Eksaminasi	10 April 2026	

Catatan:
(*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui *website* Ditjen Badilmiltun.

4. Seluruh Calon Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
5. Pimpinan Pengadilan membebastugaskan peserta di satker masing-masing dari tugas sehari-hari selama ujian berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Panitia;
6. Seluruh Calon Peserta wajib mengirimkan dokumen persyaratan kepada Panitia Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan, berupa:
- a. Surat permohonan mengikuti Eksaminasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (Lampiran I);
 - b. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (Lampiran II);
 - c. Surat Keterangan persetujuan Pimpinan Pengadilan atas permohonan Pejabat Kepaniteraan terkait (Lampiran III);
 - d. Surat Keterangan Pimpinan Pengadilan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir atas Pejabat Kepaniteraan terkait (Lampiran IV);
 - e. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - f. Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - g. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN periodik tahun terakhir beserta tanda bukti pengirimannya, berupa Pengumuman LHKPN/Tanda Terima LHKPN yang dapat diunduh dan dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id;
 - h. Fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan manual atau elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Peserta, antara lain:
 - BA Pemeriksaan Persiapan;
 - BA Persidangan Pembuktian Surat; dan
 - BA Persidangan Pembuktian Saksi.
7. Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikirimkan dalam format *.pdf* melalui email: mutasipaniteratun@gmail.com, paling lambat tanggal 11 Maret 2026;

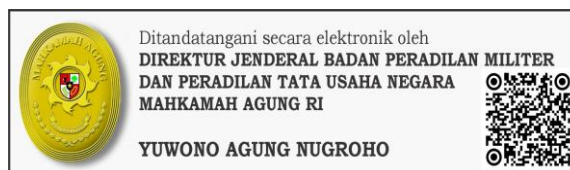


8. Dokumen persyaratan berupa fotokopi Berita Acara Persidangan sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf h dikirimkan juga dalam format cetakan (*hardcopy*) melalui POS/jasa pengiriman dokumen lainnya, yang ditujukan kepada Panitia Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan up. Seksi Mutasi Panitera dan Juru Sita Peradilan Tata Usaha Negara, paling lambat pada tanggal 11 Maret 2026;
9. Segala biaya yang timbul atas kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat menghubungi Sdri. Metty Indrasari, melalui nomor HP/WA. 081388196484.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Maret 2026



SURAT PERMOHONAN

Kota Domisili, tanggal, bulan, tahun

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Cq.
Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
di -
Jakarta

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Email :
Nomor HP (*Whatsapp*) :

mengajukan permohonan untuk mengikuti Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026, untuk formasi jabatan: **Panitera** pada
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan Dokumen Pendukung sebagaimana yang telah ditentukan, antara lain:

1. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan di Satuan Kerja Peradilan Tata Usaha Negara di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (file PDF);
2. Surat Keterangan Persetujuan Pimpinan Pengadilan mengikuti Eksaminasi (file PDF);
3. Surat Keterangan Pimpinan Pengadilan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir atas Pejabat Kepaniteraan (file PDF);
4. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (file PDF);
5. Lembar Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN Periodik Tahun (file PDF);
6. Daftar Riwayat Pekerjaan (file PDF); dan
7. Fotokopi Berita Acara Persidangan manual atau elektronik, meliputi:
 - a. BA Pemeriksaan Persiapan;
 - b. BA Persidangan Pembuktian Surat; dan
 - c. BA Persidangan Pembuktian Saksi.

Demikian surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama Lengkap



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa saya **BERSEDIA** ditempatkan di satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Materai
Rp10.000

tempat, tanggal/bulan/tahun
(
(tanda tangan)
(
Nama Lengkap



KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :

DISETUJUI untuk mengikuti Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

tempat, tanggal/bulan/tahun
(
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara /
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara,
(
(tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)
(
Nama Lengkap



KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal/bulan/tahun
(
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara /
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
(
(tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)
(
Nama Lengkap

